

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulhay, Marhainis, 1991, *Hukum Perdata Material*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adi Nugroho, Susanti, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenadamedia Group Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition*, St. Paul, Minn: West Publishing co.
- Hadjon, Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Hermansyah, 2008, *Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayu Media, Malang.
- Lubis, Andi Fahmi, *et.al.*, 2009, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks & Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2013, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martono, K., 2009, *Hukum Penerbangan*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Kencana Perdana Media Grup*, Jakarta.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2010, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sidabolok, Janus, 2006, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Bina Media, Medan
- Sirait, Ningrum Natasya, 2003, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

- Sirait, Ningrum Natasya Dkk, 2010, *Ikhtisal Ketentuan Persaingan Usaha*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Sitompul, Asril, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung).
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Persaingan di Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tanya, Bernard L, dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Usman, Rahmadi, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Antimonopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Anggraini, Anna Maria Tri, *Sinergi BUMN dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Perspektif Persaingan Usaha*, *Mimbar Hukum* Volume 25, nomor 3 Oktober 2013.
- Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.

### C. Peraturan – Peraturan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), diumumkan dengan maklumat, tanggal 30 April 1847, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992, tentang Penerbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 179 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1772);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 408).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 981).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 187 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1825).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1147) Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1263).

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 907 Tahun 2014 tentang PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai Badan Usaha Bandar Udara.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 908 Tahun 2014 tentang PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai Badan Usaha Bandar Udara.

Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha.

#### **D. Internet**

“Mengkhawatirkan, Angka Kelahiran di RI Tiap Tahun Setara Jumlah Penduduk Singapura”, <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13574351/Mengkhawatirkan.Angka.Kelahiran.di.RI.Tiap.Tahun.Setara.Jumlah.Penduduk.Singapura>. diakses 13 November 2018.

Wikipedia Indonesia, “Perusahaan Induk”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_induk](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk), diakses 25 Desember 2018.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Lalu Lintas Angkutan Udara”, <http://hubud.dephub.go.id/?id/llu/index/filter:category,1;tahun,0;bulan,0;airport,0>, diakses 13 November 2018

Sudut Hukum, “Teori Gustav Radbruch (Hukum itu Normatif, Karena nilai Keadilan)” <https://www.suduthukum.com/2017/11/teori-gustav-radbruch-hukum-itu.html>, diakses 8 April 2019.

#### **E. Lain – Lain**

Fox, Eleanor, 1999, *Memorandum kepada Pembuat Kebijakan di Indonesia, tidak dipublikasikan, there is a distinction between “policy and the “law”. In a general sense, policy is the set of goals and objectives one formulates to deal with particular matters, and laws are instruments used to carry out policy. Governments, of course, can take policy actions beyond enacting laws.*